

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan terbesar di dunia mengandung aset yang besar dimana tiap masing-masing daerah mempunyai karakteristik masing-masing.

Pulau Batam adalah satu bagian dari pulau di Indonesia yang memberikan sumbangsih terbesar bagi perekonomian Indonesia. Batam merupakan fenomena yang menarik karena merupakan kawasan yang mengalami pertumbuhan tercepat di Indonesia, baik dari ukuran penduduk, perkotaan maupun perekonomian. Sebagai suatu kawasan perekonomian, Batam merupakan salah satu dari sedikit penyangga perekonomian Indonesia. Di luar kawasan-kawasan sentral di Pantura Jawa yang membentang dari Cilegon Banten, hingga Sidoarjo Jawa Timur, Kawasan Batam bersama Bali berfungsi sebagai kawasan yang menyangga perekonomian nasional dari Luar Jawa. Batam tumbuh sepenuhnya karena faktor pengelolaan yang sangat terencana Pemerintah Pusat.

Dengan dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah, memberikan otonomi yang luas bagi daerah-daerah di wilayah Indonesia

untuk memperbaiki kondisi pemerintah daerah dan mengeliminasi potensi disintegratif daerah-daerah di wilayah Indonesia.<sup>1</sup>

Dengan UU tersebut setiap daerah berhak untuk mengelola daerahnya masing-masing guna memperbaiki dan meningkatkan kondisi pemerintah daerah dan kondisi daerahnya sendiri.

Disisi lain Indonesia sebagai salah satu negara anggota dunia juga harus siap dalam menghadapi era perdagangan bebas yang diberlakukan sejak 1 Januari 2002. Dalam hal ini Pulau Batam diharapkan akan membantu persiapan tersebut. Adanya Pulau Batam menjadi daya tarik bagi pemerintah dalam upaya peningkatan ekonomi daerah maupun nasional karena Batam memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan daerah-daerah Indonesia lainnya, antara lain karena letaknya yang strategis di dekat Singapura dengan Selat Malaka yang selalu ramai lalu lintas kapalnya, pengurusan tanah yang mudah, banyaknya kegiatan industri yang berorientasi ekspor, adanya perdagangan yang bersifat transito, adanya pelabuhan sebagai tempat kegiatan alih kapal barang, dan kesemua ini didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang lengkap.

Apalagi muncul pemikiran untuk menjadikan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*), yang kemudian sedang dalam proses pelebagaan ke dalam bentuk RUU. Hal ini tentu saja menarik perhatian berbagai pihak yang berkepentingan ataupun yang merasa berhak untuk

mengambil bagian dalam pengelolaan kawasan Batam sebagai kawasan Perdagangan bebas (*Free Trade Zone*).

Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut guna diangkat sebagai judul skripsi, yaitu: “Pengelolaan Kawasan Batam Pada Era Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas”.

## **B. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjawab pokok permasalahan dengan teori yang relevan dan membuktikan hipotesa/ dugaan sementara dalam skripsi ini dengan fakta-fakta dan data-data.
2. Untuk mengetahui Strategi Pemerintah daerah Batam dalam pengelolaan Pulau Batam era otonomi daerah dan perdagangan bebas.
3. Menerapkan teori yang telah didapat penulis di bangku kuliah dan menganalisa teori apa yang relevan untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang telah, sedang dan akan berlangsung.
4. Sebagai salah satu prasyarat untuk memilih gelar kesarjanaan S-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah, bisa

11

daerah dan mengeliminasi potensi disintegratif daerah-daerah di wilayah Indonesia.

Sejalan dengan adanya proses otonomi daerah tersebut tata perekonomian baru yang menjurus pada liberalisasi ekonomi tak terelakkan. Berbagai perjanjian internasional di bidang liberalisasi perdagangan bermunculan. Dan Indonesia pun juga harus mengikuti arus liberalisasi tersebut tanpa peduli dengan permintaan berbagai kalangan untuk menundanya. Ini merupakan konsekuensi bagi perekonomian Negara yang menganut paham pasar bebas. Paham yang memiliki ciri antara lain : kebebasan arus modal, barang/ jasa, persamaan perlakuan dan kesempatan bagi pelaku usaha dari seluruh Negara peserta.<sup>2</sup> Apalagi Indonesia telah mengakui berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), oleh karena itu Indonesia terikat secara hukum dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati.

Gejala lain yang berkembang dalam liberalisasi dan integrasi ekonomi dunia adalah munculnya sejumlah regionalisme. Beberapa negara yang terletak pada kawasan tertentu bersekutu, membentuk komunitas terpadu dalam blok-blok perdagangan secara bilateral, regional, maupun multilateral dengan menghapus seluruh hambatan bagi arus modal, barang dan jasa. Beberapa diantaranya adalah Uni Eropa atau *European Union* (EU),

Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Di lingkup Asia Tenggara, era pasar bebas regional sudah berjalan sejak disepakati membentuk Kawasan Perdagangan Bebas (AFTA) yang diberlakukan tanggal 1 Januari 2003, kemudian telah dipercepat menjadi 1 Januari 2002. Masing-masing Negara anggota di kawasan tersebut antara lain Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kemudian Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam yang menyusul belakangan setelah keikutsertaan mereka di ASEAN diresmikan. Dan dalam rentang waktu yang tidak lama lagi, datanglah era perdagangan bebas untuk kawasan Asia Pasifik pada tahun 2010/2020. Berlakunya kawasan perdagangan bebas berarti keluar masuknya suatu barang di kawasan tersebut tanpa adanya bea masuk yang relatif tinggi. Implikasinya, bagi para pendukungnya era perdagangan bebas tentu bakal membuat dunia industri lebih efisien.

Perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara (AFTA) ini sangat bertumpu pada kelancaran lalu lintas barang intra-ASEAN. Dalam hal ini AFTA bergantung pada CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) yaitu kesepakatan antara Negara-negara ASEAN untuk menghapus hambatan tarif dan mengurangi tarif antar Negara bagi seluruh hasil manufaktur dan barang-barang modal yang minimal 40% komponennya yang diproduksi di ASEAN,

mekanisme pengurangan tarif bea masuk antar Negara ASEAN hingga sebesar 0-5% pada tahun 2002-2008.<sup>4</sup>

Pembentukan AFTA merupakan suatu keputusan yang sangat tepat untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dunia. Konsekuensi untuk menerima AFTA menimbulkan dua kemungkinan bagi semua negara anggota ASEAN : menguntungkan dan merugikan. Bagi Indonesia AFTA menguntungkan apabila Indonesia mampu mempersiapkan industri domestiknya hingga memiliki tingkat efisiensi yang memungkinkan produknya dapat bersaing dengan industri-industri lain dari negara-negara anggota AFTA. Sebaliknya, kegagalan untuk meningkatkan daya saing industri domestik berarti membuka keleluasaan negara-negara anggota AFTA lainnya untuk memasukkan produksi-produksinya ke pasar domestik Indonesia. Dan apabila itu sampai terjadi berarti perekonomian Indonesia akan berada pada level paling rendah.

Dalam hal ini Batam yang merupakan salah satu bagian dari wilayah Indonesia memiliki kontribusi cukup besar dalam upaya menangani masalah di atas. Karena memiliki faktor dan keadaan pasar yang sangat cocok bagi para investor asing untuk menanamkan modal di wilayah tersebut, Batam berhasil untuk menarik banyak investor masuk ke Pulau ini. Pulau yang pada mulanya adalah pulau kosong dalam beberapa tahun sekarang sudah bisa berubah menjadi daerah industri yang sangat maju. Salah satu yang menjadi

daya tariknya adalah karena letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional.

Batam merupakan salah satu kawasan di Indonesia yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan ekonomi regional dan nasional yang kemudian memunculkan pemikiran dan pelebagaan dalam RUU tentang penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*). Berdasarkan hal-hal diatas tentunya Batam memiliki posisi yang cukup besar dalam menghadapi AFTA sesuai dengan penetapannya sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas di Indonesia.

Namun kiranya krisis moneter yang terjadi tahun 1997 lalu, ditambah lagi genderang terorisme begitu menggema di Indonesia dan aktifitas disintegasi nasional yang merambah pada kerusuhan massal menjadikan kekhawatiran tersendiri terhadap usaha investasi nasional yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan investor .

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dari Latar Belakang permasalahan tersebut muncul pertanyaan:  
“Bagaimana Strategi Badan Otorita Batam dalam mengembangkan Batam Era Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas (Masa Kepemimpinan Jemeth

## **E. Kerangka Teoritis**

Untuk mendeskripsikan jawaban dari pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis menggunakan konsep sebagai alat bantu. Adapun konsep yang penulis pergunakan adalah:

### **1. Konsep Strategi**

Sekarang ini pengertian strategi sudah berkembang. Strategi semakin harus memperhitungkan faktor-faktor non militer seperti ekonomi, politik, psikologi, moril, dan teknologi. Dengan demikian strategi tidak saja merupakan konsep perang, tetapi juga telah menjadi unsur yang inheren dari kenegarawan dalam waktu perang dan damai.

John Lovell mendefinisikan strategi adalah serangkaian langkah-langkah atau moves atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam suatu situasi kompetitif yang hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan.<sup>5</sup> Jadi, perancangan strategi adalah tindakan yang penuh perhitungan, dan bukan tindakan untung-untungan.

Dalam hal ini konsep strategi digunakan untuk mengetahui strategi yang digunakan Badan Otorita Batam dalam pengelolaan Batam era otonomi daerah dan perdagangan bebas. Untuk itu tentunya Badan Otorita Batam harus benar-benar tahu SWOT yang ada di Batam.

---

<sup>5</sup> Mochtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisis*,



SWOT merupakan kependekan dari *Strengths*, *Weakness*, *Oportunities*, dan *Treaths*, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.<sup>6</sup>

Pengertian mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah:

- a. Kekuatan (*Strengths*) adalah suatu keunggulan sumber daya yang berlimpah yang belum terjadi secara optimal sehingga memberikan kemungkinan suatu organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya.
- b. Kelemahan (*Weakneasses*) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya manusia serta ketrampilan dalam dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja efektif suatu organisasi.
- c. Peluang (*Oportunities*) adalah suatu yang menguntungkan dalam suatu organisasi, daerah dan bahkan negara.
- d. Ancaman (*Treaths*) adalah merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam suatu organisasi, daerah dan bahkan negara.

Ini merupakan salah satu pendekatan dimana dalam menyusun strategi pengelolaan suatu daerah, pemerintah dalam hal ini Badan Otorita Batam harus memikirkan mengenai kekuatan apa saja yang dimiliki, kelemahan yang melekat, dan pada akhirnya harus tahu atau mampu untuk

mengetahui ancaman, gangguan/ hambatan serta tantangan dalam mengelola Batam.

Pendekatan SWOT ini sering dipandang sebagai jawaban atas pertanyaan: *how to win the game/competition? How to bid the enemy/rival?* Dengan menggunakan analisa SWOT tersebut maka Badan Otorita Batam akan dapat melihat permasalahannya untuk memperoleh jawaban.

Pada umumnya pola pikir dari pendekatan SWOT dibagi menjadi tiga aspek, yaitu:

#### 1. Aspek Global

Aspek Global merupakan aspek yang paling mendasar yang harus berjangka panjang, biasanya menyangkut sampai 25 tahun. Dalam aspek global ini kita harus mengetahui SWOT kita yang berkaitan dengan aspek global (aspek yang bersifat garis besar) yang kadang-kadang bersifat internasional serta tidak jarang bernuansa religius. Aspek ini sangat berkaitan dengan *Misi* dan *Visi* yang harus dikembangkan oleh Badan Otorita tersebut.

Misi dan Visi merupakan rencana global yang harus dirancang dari SWOT yang dimiliki oleh daerah Batam, sehingga rencana tersebut akan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan akar permasalahan yang ada. Oleh karena itu Badan Otorita Batam harus

melakukan analisis terhadap faktor internal maupun eksternal dalam pengelolaan kawasan Batam itu sendiri.

Analisis faktor internal yang ditujukan untuk dapat memperoleh kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh daerah Batam. Sedangkan faktor eksternal adalah untuk memperoleh gambaran mengenai kesempatan yang terbuka serta ancaman, gangguan, hambatan, serta tekanan yang menghimpit daerah Batam.

## 2. aspek strategis

Aspek strategis ini merupakan penjabaran yang lebih rinci ke dalam rencana yang lebih bersifat menengah, guna menganalisis apa yang sudah dirumuskan oleh rencana global di atas. Aspek ini berkaitan dengan SWOT yang berdampak jangka menengah yang biasanya 5 tahunan. Pada tahap ini kita harus mampu untuk memikirkan bagaimana alternatif strategi yang mungkin dapat dilakukan untuk merealisasikan rencana global, dengan tetap memperhatikan SWOT yang ada pada daerah Batam. Semakin banyak alternatif yang dapat dipertimbangkan maka akan semakin baik mutu perencanaannya, begitu juga sebaliknya.

## 3. Aspek Operasional

Aspek operasional berdampak atau berdimensi waktu jangka

operasional serta rinci terhadap rencana strategis. Operasionalisasi terhadap strategi yang telah dipilih dan ditetapkan harus ditindaklanjuti dalam bentuk penentuan ketrampilan atau keahlian yang harus dikuasai, bentuk-bentuk latihan yang harus dilaksanakan, alat-alat macam apa yang harus dipersiapkan, begitu juga siapa yang harus melakukannya dan sebagainya. Sehubungan dengan persiapan tersebut maka perlu pula disusun target yang harus dicapai serta anggaran atau budget yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan rencana tersebut.

Dari pendekatan SWOT ini jika digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada, kekuatan, kelemahan, ancaman/ gangguan, dan peluang yang dimiliki Batam sebagai langkah Badan Otorita Batam (BOB) untuk menyusun strategi untuk mengelola/ mengembangkan Batam.

## **2. Kepentingan Nasional**

Kepentingan suatu negara adalah kepentingan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kedaulatan negara, keamanan militer, politik, dan ekonomi.<sup>7</sup> Secara umum kepentingan nasional didefinisikan sebagai tujuan dan strategi negara baik untuk mencapai kemajuan maupun untuk mempertahankan negara. Kepentingan nasional suatu negara merupakan unsur yang sangat vital tapi perlu ditekankan

---

<sup>7</sup> Jack. C. Plato, Roy Olton, *The Internasional Relations Dictionary*, terjemahan Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd, 1982

dalam hal ini bahwa masing-masing negara mempunyai kekuatan dan kepentingan yang berbeda-beda.

Dalam hal ini kepentingan nasional dibedakan menjadi dua yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri, dimana untuk untuk mewujudkannya akan dibuat suatu kebijakan. Kebijakan dalam negeri menekankan pada hubungan dan kepentingan antara pemerintah dengan rakyatnya. Sedangkan kebijakan luar negeri menekankan pada hubungan dan kepentingan antara pemerintah suatu negara dengan negara lain.

Kepentingan nasional Indonesia yang tetap adalah kesejahteraan rakyat dan keamanan bangsa Indonesia termasuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, juga cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.<sup>8</sup> Salah satu kebijakan luar negeri yang diambil adalah dengan melakukan hubungan luar negeri yang diupayakan untuk meningkatkan arus investasi asing, disamping berbagai kerjasama ekonomi dan keuangan baik dengan negara-negara lain maupun lembaga-lembaga internasional.<sup>9</sup>

Setiap negara di dunia pastinya membutuhkan bantuan dari negara lainnya. Oleh karena itu kerjasama internasional merupakan suatu hal yang sangat penting dan mutlak untuk dilakukan bagi setiap negara. Kerjasama ini diwujudkan dalam dalam berbagai hal, baik itu ekonomi, politik, militer, juga social budaya.

---

<sup>8</sup> Djumadi M.Anwar, Diktat "*Politik Luar Negeri Indonesia*" Revisi Oktober 2005 (berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alenia VI), hal. 35.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 65

Pentingnya kerjasama internasional di dalam wadah organisasi internasional dipertegas dengan pernyataan Padelford dan Lincoln, sebagai berikut:

*“The roots of cooperation organization line in awareness of some area of common interest and agreed purpose, which the panies believe can be futhured to better advantage by having an organization or mechanism than by not having done.”* <sup>10</sup>

Artinya, akar-akar dan kerjasama dalam organisasi internasional terletak pada kesadaran terhadap adanya kepentingan-kepentingan bersama dan tujuan-tujuan yang telah disepakati, dimana masing-masing pihak yang bersangkutan percaya akan dapat keuntungan yang lebih baik dengan memiliki organisasi atau mekanisme daripada tidak melakukan kerjasama.

Dalam kerjasama internasional dikenal adanya kerjasama bilateral, trilateral dan multilateral. Disamping itu juga ada kerjasama regional, yaitu kerjasam antar negara yang berada dalam suatu kawasan tertentu, misalnya ASEAN. Dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Sedangkan kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Singapura mengenai Selat Malaka adalah contoh kerjasama trilateral sub regional.

Sebagai perwujudan dan realisasi perdagangan bebas di era perdagangan bebas ini telah ada beberapa bentuk kerjasama ekonomi regional dan internasional, dimana Indonesia terkait langsung sebagai salahsatu anggotanya, diantaranya APEC dan AFTA.

Perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai suatu konsep ekonomi dimana lalu lintas transaksi perdagangan antar bangsa dilakukan secara bebas tanpa hambatan, tidak lagi dibatasi dan dibebani dengan yang

disebut dinding tarif, bea masuk, sistem kuota maupun prosedur pabean yang rumit dan berbelit-belit.<sup>11</sup>

Dalam hal ini karena posisi Batam yang strategis, berdekatan dengan negara lain yaitu Singapura dan Malaysia sehingga membuat Batam menjadi berkepentingan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain (kerjasama internasional) khususnya dalam menarik investasi asing. Dengan strategi kerjasama internasional yang dilakukan tersebut diharapkan kepentingan nasional Indonesia dapat tercapai.

## **F. Hipotesis**

Strategi Badan Otorita Batam dalam Pengembangan Kawasan Batam Pada Era Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas adalah :

1. Dalam negeri : mengembangkan potensi-potensi domestik, sarana dan prasarana.
2. Luar negeri : menjalin kerjasama dengan luar negeri untuk meningkatkan arus investasi asing.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Agar kajian ini lebih fokus lagi, maka penulis memberikan batasan waktu terhadap objek kajian, yaitu Pengelolaan Kawasan Batam Pada Masa kepemimpinan Ismeth Abdullah (1998-2005).

## **H. Metode Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pencarian data penulisan, penulis mencoba mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Oleh karena itu data yang akan diperoleh merupakan data sekunder yang antara lain berasal dari surat kabar, internet, artikel-artikel, serta buku-buku penunjang lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam membantu penulisan ini



## **I. Sistematika Penulisan**

- BAB I** : Pendahuluan, berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teoritis, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Berisi tentang Sejarah dan Perkembangan Pulau Batam yang meliputi Gambaran umum Pulau Batam, Pemerintahan Batam dan Otonomi Daerah.
- BAB III** : Membahas tentang Perdagangan Bebas, Kerjasama ASEAN, Terbentuknya AFTA, Implikasi Kerjasama Internasional.
- BAB IV** : Berisi tentang Pengelolaan Batam Era Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas, Strategi Pengelolaan Batam Masa Ismeth Abdullah.
- BAB V** : Kesimpulan.